

- Kementrian Sosial
- Kementrian Kesehatan.
- Kementrian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Departemen Dalam Negeri merupakan kelanjutan dari Kementrian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

Sejak berdirinya Departemen Dalam Negeri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Gotong Royong sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri. Departemen Dalam Negeri di pimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
- Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya, Departemen Dalam Negeri mempunyai kewenangan, antara lain:

- Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
- Penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- Penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibukota daerah;
- Penetapan pedoman ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta kesatuan bangsa;
- Penetapan pedoman administrasi kependudukan;

- Penetapan pedoman perencanaan daerah;
- Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;
- Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- Penetapan syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah;
- Penetapan pedoman tata cara kerjasama daerah dengan lembaga atau badan luar negeri, dan kerjasama antar daerah atau desa dan antara daerah atau desa dengan pihak ketiga;
- Penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah atau Desa;
- Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan daerah di kawasan otorita dan sejenisnya;
- Penetapan pedoman mengenai pengaturan desa;
- Pengaturan tugas perbantuan kepada daerah dan desa, serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
- Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Struktur Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri, terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
6. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
8. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

13. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
14. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
15. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
16. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

E. Gambaran Umum Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian ini bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Sekretariat Jenderal dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, mutasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai;
- Penyusunan rencana pola karier dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- Pelaksanaan mutasi pegawai;
- Pengembangan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri ini terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
2. Bagian Pengembangan Karier;
3. Bagian Mutasi;
4. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan.

Bagian Perencanaan Kepegawaian ini mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Departemen. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha Biro.

Dalam Bagian Perencanaan Kepegawaian terdapat 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian Formasi dan Perencanaan
2. Subbagian Data Pegawai
3. Subbagian Tata Usaha Biro.

Dari masing-masing Subbagian yang terdapat pada Bagian Perencanaan Kepegawaian juga memiliki tugas yang harus dilakukan yaitu:

- Subbagian Formasi dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan formasi dan perencanaan kebutuhan pegawai dan penyelesaian usulan serta keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- Subbagian Data Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pegawai.
- Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan rutin dan rumah tangga Biro.

Bagian Pengembangan Karier mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola karier, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan ujian dinas dan jabatan serta jabatan struktural dan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan calon dan pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan ujian dinas, ujian jabatan dan kinerja;
- Penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional.

Bagian Pengembangan Karier terdiri dari:

1. Subbagian Calon dan Alumni Pendidikan dan Pelatihan;
2. Subbagian Ujian Dinas, Ujian Jabatan dan Kinerja;
3. Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional.

Dari masing-masing Subbagian yang terdapat pada Bagian Pengembangan Karier juga terdapat tugas yang harus dilakukan, yaitu:

- Subbagian Calon dan Alumni Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan calon dan pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan pegawai.
- Subbagian Ujian Dinas, Ujian Jabatan dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan ujian dinas, ujian jabatan dan evaluasi kinerja.
- Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional.

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan mutasi, pemberhentian dan pemensiunan pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan usulan kenaikan pangkat dan mutasi pegawai;
- Pelaksanaan mutasi kader dan mutasi lain-lain;
- Penyiapan usulan pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

Bagian Mutasi terdiri dari:

1. Subbagian Kenaikan Pangkat;
2. Subbagian Kader;
3. Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.

Dari masing-masing Subbagian yang terdapat pada Bagian Mutasi juga terdapat tugas yang harus dilakukan, yaitu:

- Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas menyiapkan usulan mutasi kenaikan pangkat pegawai.
- Subbagian Kader mempunyai tugas menyiapkan usulan mutasi kepegawaian bagi calon pegawai, pegawai tugas belajar pada Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi lainnya serta Penyelesaian mutasi kader.
- Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas menyiapkan usulan pemindahan pegawai, mutasi pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Disiplin dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pengembangan disiplin pegawai;
- Penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai;
- Penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan terdiri dari:

1. Subbagian Disiplin;
2. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian;
3. Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan..

Dari masing-masing Subbagian yang terdapat pada Bagian Disiplin juga memiliki tugas yang harus dilakukan, yaitu:

- Subbagian Disiplin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penerapan, pembinaan dan penilaian disiplin pegawai.
- Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum serta petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan mempunyai tugas menyiapkan usulan dan administrasi kesejahteraan pegawai serta pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA BIRO

KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pada bab IV ini, peneliti akan membahas 3 hal utama, yang terbagi ke dalam 3 subbab. Ketiga subbab tersebut, berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada bab I. Pada subbab pertama, peneliti akan membahas mengenai gambaran umum dari sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada Departemen Dalam Negeri yang isinya tentang SIMPEG Departemen Dalam Negeri. Kemudian pada subbab yang kedua, peneliti akan membahas tentang proses pelaksanaan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri. Pada subbab ini, salah satu hal yang peneliti ingin lihat adalah bagaimana kegunaan SIMPEG bagi *user-usernya*. Pada subbab terakhir, peneliti akan membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMPEG tersebut.

A. SIMPEG Departemen Dalam Negeri

Pelaksanaan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian selaku Biro yang mengurus permasalahan kepegawaian. Latar belakang pembuatan SIMPEG adalah kesadaran akan pentingnya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi dalam hal memanajemen data-data pegawai.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan dalam penelitian ini, berikut kutipan penjelasannya:

...SIMPEG itu awalnya dibuat karena banyaknya PNS daerah yang harus diarsipkan di Departemen Dalam Negeri. Saat itu Departemen Dalam Negeri banyak mengalami kendala, seperti pada saat input data. Saat input data, belum selesai di input ternyata di daerah sudah ada perubahan dalam hal data PNS-nya.⁷²

Informasi tersebut diperkuat oleh informan lainnya dalam penelitian ini.

Berikut kutipan penjelasannya:

...latar belakang Departemen Dalam Negeri ingin membuat SIMPEG ya untuk melakukan manajemen sumber daya manusia yang ada secara lengkap. Seperti data pribadi, data karier, data pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Mengingat semakin pentingnya nilai pegawai atau pegawai memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi.⁷³

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka Departemen Dalam Negeri melakukan inisiatif untuk membuat suatu sistem yang dapat mempermudah pengumpulan data pegawai. Hal tersebut dikarenakan pegawai memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Selain itu, lahirnya SIMPEG depdagri dikarenakan pengumpulan data-data pegawai dahulu yang dilakukan dengan “manual” memiliki banyak permasalahan, seperti kehilangan data-data pegawai secara tidak sengaja oleh pegawai yang mengelolanya. Pelaksanaan SIMPEG salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi terjadinya kehilangan data-data pegawai, karena dengan SIMPEG data-data pegawai telah *diback-up*.

⁷² Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta.

⁷³ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008.

1. SIMPEG Berbasis Desktop

Keinginan untuk melakukan proses pengembangan SIMPEG sudah ada sejak tahun 1985, melihat pada adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1985 tentang Komputerisasi Kepegawaian Departemen Dalam Negeri. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

...betul sekali pada tahun 1985, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 49 yang inti dari isinya adalah untuk membuat komputerisasi kepegawaian dalam lingkup depdagri. Jadi, kita mengalami "stag" dalam proses pengembangannya, karena di depdagri saat itu masih belum ada pegawai yang berinisiatif.⁷⁴

Akan tetapi proses pengembangan SIMPEG baru terjadi pada tahun 1995 dengan kerjasama dengan Kepala Biro Kepegawaian se-propinsi. Hal tersebut diperkuat dengan informasi diperoleh dari salah seorang informan dalam penelitian ini:

...SIMPEG ini mulai dirancang sekitar tahun 1995, diawali dengan berkumpulnya Kepala Biro Kepegawaian se-propinsi di malang yang menghasilkan "traktat malang". Propinsi yang sangat "sreg" dengan proses pengembangan SIMPEG ini adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tahun 1995 baru membuat anggarannya. Kemudian baru pada tahun 1996, mulai melakukan bangun rancang aplikasi SIMPEG yang mengikutsertakan BAKN.⁷⁵

Setelah itu, mulai dilakukan penerapan SIMPEG dengan menggunakan sistem tertutup (*closed system*) yang lebih dikenal dengan SIMPEG berbasis *desktop*. Menurujuk pada teori yang digunakan, *closed system* adalah sistem yang

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta.

⁷⁵ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta.

tingkah lakunya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Bila melihat pada penerapan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri, berarti SIMPEG tersebut tidak mendapatkan pengaruh yang besar dari lingkungan di luar Departemen Dalam Negeri. Jadi, SIMPEG mengikutsertakan data-data pegawai daerah, akan tetapi data-data pegawai daerah untuk diproses memakan waktu yang lama, mengingat ada batasan geografis. Hal tersebut dapat terlihat bahwa SIMPEG belum dapat mengakomodir data-data pegawai daerah melihat SIMPEG belum dapat digunakan secara *on-line (internet dan intranet)*. Pelaksanaan SIMPEG bertujuan untuk mempermudah pimpinan dalam hal data-data pegawai yang berada di Departemen Dalam Negeri. Pada awalnya pelaksanaan SIMPEG tersebut dapat membantu dalam hal pengumpulan data, tetapi seiring dengan pelaksanaan SIMPEG secara tidak langsung ditemukan kekurangannya. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan salah seorang informan dalam penelitian ini, yang menyebutkan:

...pelaksanaan SIMPEG dengan berbasis desktop ini banyak mengalami kelemahan dimana-mana. Kelemahan yang paling vatal terlihat pada peng-instalan aplikasi SIMPEG, yang mana untuk dapat melihat data-data hasil SIMPEG, komputer client harus dilakukan peng-instalan seperti pada komputer server. Kemudian pada SIMPEG berbasis desktop akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan terjadinya komunikasi data on-line (internet dan intranet), yang mana hal tersebut bertujaun untuk mewujudkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Karena Komunikasi data secara off line sangat tidak efektif sehingga data menjadi tidak up to date karena prosesnya sangat lambat.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta.

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada SIMPEG berbasis desktop seperti informasi yang di dapat di atas, membuat Departemen Dalam Negeri berinisiatif untuk mengembangkan SIMPEG. Proses pengembangan yang di maksud adalah dengan membuat SIMPEG menjadi lebih berdaya guna. Dalam hal pengefisienan waktu untuk melakukan *input* data pegawai yang berasal dari daerah pada umumnya dan Departemen Dalam Negeri secara khusus. Pada akhirnya proses pengembangan tersebut menghasilkan SIMPEG berbasis web.

2. SIMPEG Berbasis Web .

Pengembangan SIMPEG terjadi pada tahun 2004, hal tersebut didorong oleh adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri. Menurut Kepmendagri tersebut yang dimaksud dengan SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat lunak. Selain itu, salah satu isinya adalah untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan dan pemeliharaan/pemutakhiran informasi kepegawaian, perlu dikembangkannya SIMPEG yang dapat menunjang pemeliharaan/pemutakhiran informasi kepegawaian yang lebih baik. Oleh karena itu, dikembangkanlah SIMPEG yang dapat mempermudah akses informasi kepegawaian daerah yang kemudian bernama SIMPEG berbasis web. Selain Kepmendagri tersebut, hal yang mendorong perlu dikembangkannya SIMPEG adalah Undang-undang 32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang tersebut, terutama pasal 134 ayat 4 dikatakan bahwa Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah

untuk penghitungan dan penyesuaian alokasi dasar dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari salah satu informan:

...perubahan dari closed ke opened, harus dilakukan karena berdasarkan Kepmendagri No.17 Tahun 2000 untuk melakukan pemutakhiran data pegawai. Jika menggunakan sistem lama, pelaksanaannya akan lama memprosesnya. Tapi dengan menggunakan SIMPEG yang berbasis web, proses pelaksanaannya akan lebih cepat. Perubahan tersebut sudah saya rencanakan pada tahun 2004. Kemudian baru rampung sekitar tahun 2005.⁷⁷

Selain itu, SIMPEG berbasis web ini lahir karena terjadinya proses globlisasi yang membuat teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, SIMPEG berbasis web ini menggunakan teknologi informasi yang mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan teknologi informasi pada SIMPEG yang baru ini, memberikan keuntungan dalam hal penyajian data yang akan cepat, tepat, dan berdaya guna. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari salah sorang informan:

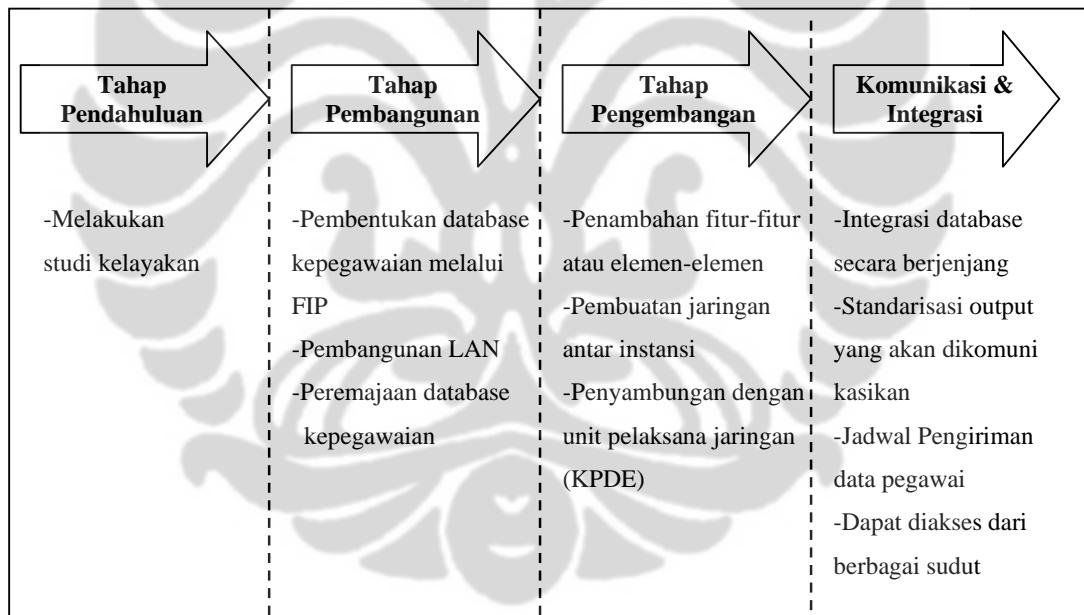
...keunggulan SIMPEG berbasis web ini dibandingkan dengan SIMPEG yang lama, yang pertama adalah penggunaan internet/intranet sebagai sarana komunikasi di dalam sistem, yang berdampak pada semakin mudahnya akses dan dapat menghemat waktu dan biaya. Kedua, dapat menggunakan semua sistem operasi (Multi Operating System). Ketiga, memudahkan dalam manajemen sistem (hanya dilakukan pada server) sehingga komputer client tidak perlu di install SIMPEG. Yang terakhir, mempermudah proses integrasi database.⁷⁸

Jadi, pada dasarnya pengembangan SIMPEG tersebut karena adanya dorongan untuk melakukan pemutakhiran dan peremajaan data pegawai, baik data pegawai daerah maupun Departemen Dalam Negeri. Proses pemutakhiran data

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta.

⁷⁸ Wawancara dengan Pranata Komputer pada Subbagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2008.

pegawai daerah dilakukan oleh Biro Kepegawaian daerah (propinsi dan kabupaten) yang dikoordinasikan dengan KPDE daerah masing-masing dan data pegawai Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, dikoordinasikan dengan pusat data dan sistem informasi Departemen Dalam Negeri. Proses pemutakhiran data pegawai meliputi 4 tahap yang saling berkesinambungan satu dengan lainnya. Tahapan dalam pemutakhiran data pegawai pada lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari tahap pendahuluan, pembangunan, pengembangan, dan komunikasi dan integrasi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di bawah ini:



Gambar IV.1

Grand Strategi SIMPEG

Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Pelaksanaan SIMPEG dimulai melalui penayangan informasi kepegawaian pada lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berasal dari data internal dan eksternal. Data internal maksudnya data kepegawaian yang berasal dari pegawai-pegawai Departemen Dalam Negeri. Sedangkan data eksternal maksudnya data pegawai-pegawai yang berasal dari daerah. Informasi tersebut adalah:

- Data Pokok Pegawai;
- Data Riwayat Pegawai; dan
- Data Mutasi Pegawai

Hal ini sejalan dengan pernyataan salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

...data-data yang diproses di dalam SIMPEG berasal dari pengisian data pokok pegawai, yang meliputi lokasi kerja, identitas pegawai dan sebagainya. Kemudian data riwayat pegawai yang salah satu elemennya adalah riwayat kepangkatan. Yang terakhir berasal dari data mutasi, yang salah satu elemennya adalah mutasi pengangkatan PNS.⁷⁹

Jadi, data-data kepegawaian yang berasal dari data kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diproses dengan menggunakan SIMPEG dan menghasilkan informasi kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan tiap komponen organisasi Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Informasi kepegawaian yang dihasilkan SIMPEG akan sangat berguna dalam mengarahkan pimpinan, dalam hal ini kepala bagian/subbagian untuk mengambil keputusan yang terkait dengan bidangnya.

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta.

B. Pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri

Pelaksanaan SIMPEG pada lingkungan Departemen Dalam Negeri merupakan suatu sarana untuk mengolah data kepegawaian yang berasal dari lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. SIMPEG itu sendiri erat kaitannya dengan pelaksanaan *e-Government* yang dicanangkan pemerintah dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Jadi, pelaksanaan SIMPEG tersebut merupakan suatu bentuk pengaplikasian dari pelaksanaan *e-Government*. Dalam proses pelaksanaan SIMPEG, komponen-komponen pelaksanaannya sama dengan komponen yang menjalankan sistem informasi, yaitu *hardware, software, brainware, netware, dan database*. Pelaksanaan SIMPEG merupakan suatu contoh dari proses pemanfaatan teknologi informasi yang akan membantu dalam pengolahan data-data kepegawaian. Hal tersebut sejalan dengan informasi yang didapat dari Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, yaitu

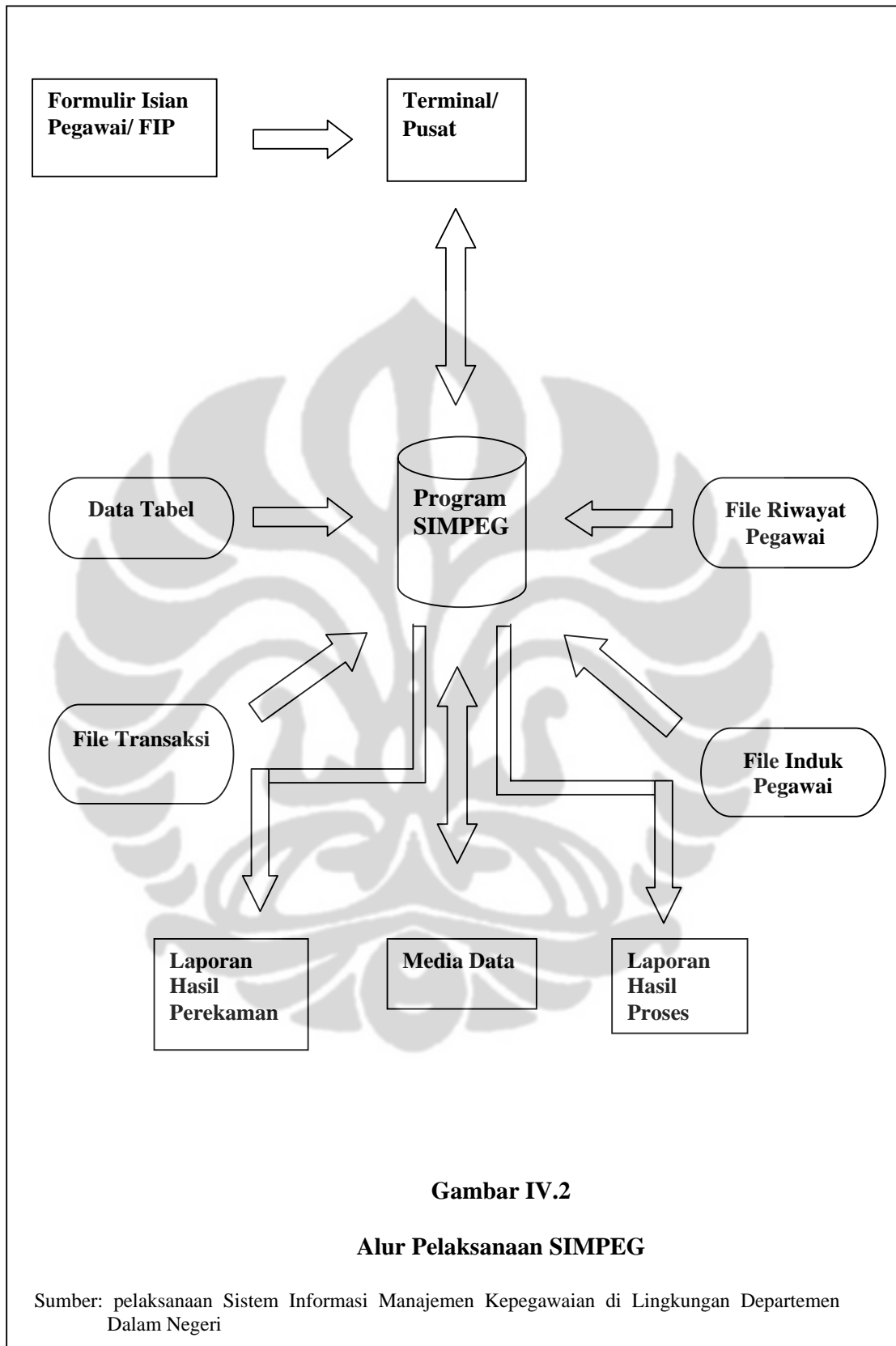
...pelaksanaan SIMPEG itu berawal dari kemajuan teknologi informasi, yang mana dengan teknologi informasi dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dari suatu sistem. Penggunaan SIMPEG itu dapat membantu manajemen data-data kepegawaian. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan dalam mengolah data-data kepegawaian dapat dilakukan dengan mudah. Jadi, SIMPEG dapat berjalan dengan baik bila diiringi dengan mengikuti perkembangan yang terjadi pada teknologi informasi.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008.

Jadi, pelaksanaan SIMPEG ini sudah melakukan proses penyederhanaan akses informasi kepegawaian dan telah memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi (terkait dengan penggunaan *internet*). Secara umum pelaksanaan SIMPEG ini dapat mempermudah Departemen Dalam Negeri untuk mencari data-data pegawai dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan.

1. Prosedur Pelaksanaan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri

Prosedur pelaksanaan SIMPEG merupakan suatu acuan dalam melaksanakan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri. Prosedur tersebut sangat berguna agar pelaksanaan SIMPEG tidak keluar dari koridor yang telah ada. Prosedur pelaksanaan SIMPEG pada Departemen Dalam Negeri merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pemerintah Daerah. Gambaran awal tentang prosedur pelaksanaan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri dapat terlihat pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa proses pelaksanaan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri diawali dengan berkas formulir isian pegawai. Formulir isian pegawai (FIP) merupakan sarana untuk mengumpulkan data master maupun data mutasi kepegawaian. FIP tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu FIP 01, FIP 02, dan FIP 03. FIP 01 berisikan tentang data pokok pegawai, FIP 02 berisikan data riwayat pegawai, dan FIP 03 berisikan data mutasi pegawai. FIP yang ada dimasukkan kedalam terminal atau peralatan yang digunakan untuk memasukkan data kedalam media komputer dan digunakan untuk menampilkan hasil yang diinginkan. Setelah FIP dimasukkan ke dalam terminal, untuk menjadi informasi yang diinginkan lalu diproses dengan menggunakan program SIMPEG. Selain FIP, yang diproses dengan program SIMPEG adalah data tabel. Data tabel merupakan data penunjang yang disimpan kedalam media komputer. Setelah FIP dan data tabel diproses dengan program SIMPEG, hasilnya berupa file transaksi (arsip yang berisikan data mutasi), file induk pegawai (arsip yang berisikan data lengkap tentang administrasi pegawai), dan file riwayat pegawai (arsip yang berisikan data riwayat pegawai). Kemudian hasil tersebut disimpan kedalam media data (peralatan untuk menyimpan data hasil SIMPEG). Laporan hasil perekaman adalah laporan hasil dari tahapan perekaman data-data pada media komputer yang dapat terlihat pada layar komputer. Kemudian yang dimaksud dengan laporan hasil proses adalah hasil akhir dari pengolahan komputer yang terdiri dari bermacam-macam laporan mengenai keadaan pegawai.

Jadi, dapat dijelaskan bahwa arus/prosedur dalam pelaksanaan SIMPEG pada lingkungan Departemen Dalam Negeri berawal dari pengisian FIP yang kemudian diberikan kepada terminal/alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari FIP kedalam program SIMPEG. Setelah data-data tersebut diolah dengan program SIMPEG, pada akhirnya menghasilkan data kepegawaian secara elektronik dan tersimpan didalam komputer yang akan digunakan kepala bagian/subbagian sebagai bahan acuan pengambilan keputusan, terkait dengan bidangnya.

Mengenai prosedur pelaksanaan SIMPEG di atas, sesuai dengan informasi yang didapat peneliti dari salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

...inputnya adalah FIP (Formulir Isian Pegawai) 01, 02 dan 03. Tetapi, saat memasukkan data-data itu, harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti akte kelahiran, ijazah dari SD sampai perguruan tinggi, surat nikah, sertifikat diklat, dan lain-lain. Jadi, pegawai tidak bisa bohong tentang data diri mereka saat mengisi FIP 01 dan 02 ini.⁸¹

Informasi yang didapat dari informan di atas, dikuatkan dengan salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

Dari FIP 01 dan 02 itulah datanya kita proses dengan cara meng-entry ke komputer yang sudah di-install software SIMPEG. Dan data-data tersebut akan aman tersimpan di dalam komputer. Hasilnya adalah informasi mengenai Daftar Nominatif Pegawai, jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang, daftar pegawai yang akan pensiun tahun ini. Macam-macamlah, tergantung dari kebutuhan dan permintaan user.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

⁸² Wawancara dengan Pranata Komputer pada Subbagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2008

Informasi yang berasal dari SIMPEG mempunyai tingkat kerahasiaan yang tinggi, karena informasinya mengenai data-data pegawai mulai dari pegawai dengan jabatan terendah sampai tertinggi. Untuk itu, diperlukan sistem pengamanan yang canggih. Berikut ini adalah prosedur pengamanan data dan informasi kepegawaian, yaitu:

1. Pengamanan Data
 - a. Melakukan back-up terhadap data pegawai yang sudah pensiun, meninggal dunia, dan diberhentikan sesuai retensi arsip.
 - b. Mengamankan data kepegawaian sedemikian rupa sehingga tidak dibenarkan pemberian informasi kepegawaian tanpa persetujuan Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri/ Biro Kepegawaian Propinsi/ Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota.
 - c. Otorisasi data kepegawaian diberikan oleh Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian.
 - d. Pemberian *account* dan *password* kepada *user* yang menggunakan data-data pegawai
2. Pengamanan Sistem

Melakukan back-up terhadap seluruh isi dari sistem yang digunakan dalam proses pengolahan data kepegawaian secara rutin
3. Perawatan

Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri/ Propinsi, Bagian Kepegawaian Kabupaten/ Kota melaksanakan perawatan data karena menyangkut perangkat keras dan lunak yang dilakukan secara periodik.

2. Aplikasi-aplikasi dalam SIMPEG

Aplikasi merupakan sarana yang akan digunakan dalam pengolahan data-data pegawai, baik pada tingkat Departemen Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah. Aplikasi-aplikasi dalam program SIMPEG dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi mengenai data-data kepegawaian pada Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berikut adalah tampilan aplikasi dalam program SIMPEG pada Departemen Dalam Negeri:



Gambar IV.3

Tampilan Awal SIMPEG Depdagri

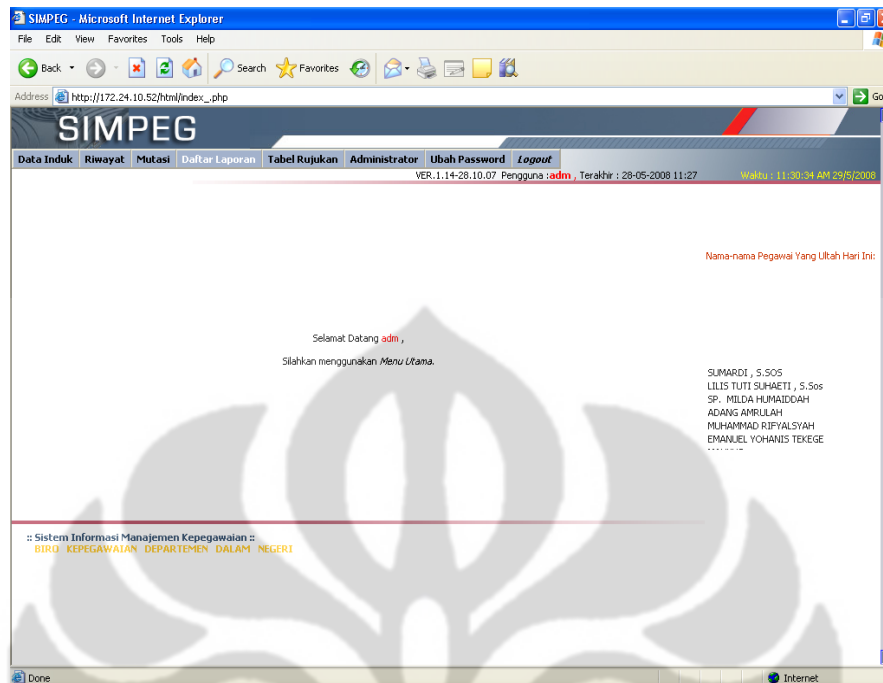
Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan gambar IV.3 di atas, dapat terlihat bahwa pada tampilan awal SIMPEG terdapat hanya 5 propinsi. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan SIMPEG secara *on-line* banyak mengalami hambatan dari segi jaringan pada propinsi. Dengan kata lain kelima propinsi yang ada dapat melakukan *on-line* dengan Depdagri secara langsung karena kelima propinsi tidak mengalami gangguan dalam jaringannya. Sedangkan pada propinsi lainnya banyak terjadi masalah jaringan yang menyebabkan sulit melakukan *on-line* secara rutin. Hal tersebut sesuai dengan salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

*...untuk akses on-line biasanya hanya propinsi yang tidak mengalami masalah jaringan saja yang bisa melakukannya. Sebenarnya hamper semua propinsi sudah mempunyai jaringan, tetapi karena jaringan jarang digunakan menyebabkan terputusnya jaringan mereka.*⁸³

Setelah *user* memasukkan accountnya, baru muncullah tampilan menu utama dalam program SIMPEG. Tampilan tersebut dapat dilihat di bawah ini:

⁸³ Wawancara dengan Pranata Komputer pada Subbagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2008

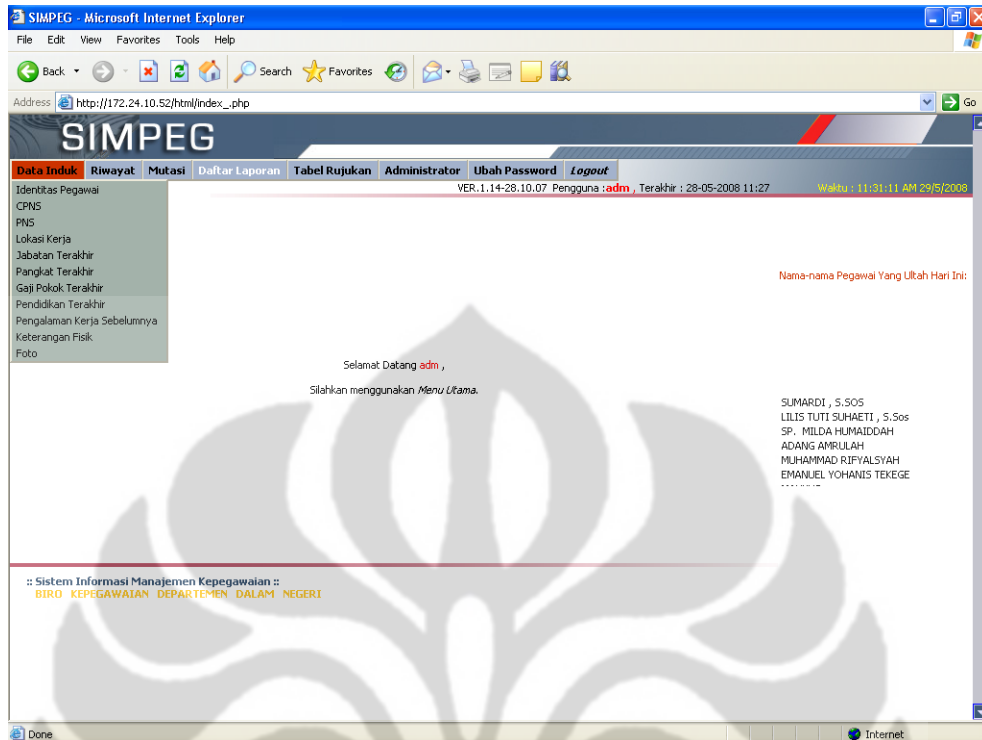


Gambar IV.4

Tampilan Menu Utama SIMPEG

Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan pada gambar IV.4 di atas, dapat terlihat bahwa pada menu utama dalam program SIMPEG terdapat menu seperti data induk, data riwayat, data mutasi, daftar laporan, tabel rujukkan, administrator, ubah password, dan logout. Berdasarkan menu tersebut terdapat 3 menu yang merupakan *input* dari program SIMPEG, yaitu data induk, data riwayat, dan data mutasi . Pada menu data induk terdapat file identitas pegawai, CPNS, PNS, lokasi kerja, jabatan terakhir, pangkat terakhir, gaji pokok terakhir, pendidikan terakhir, pengalaman kerja sebelumnya, keterangan fisik, dan foto. Tampilan pada menu utama yang berisi data induk pegawai dapat terlihat di bawah ini:

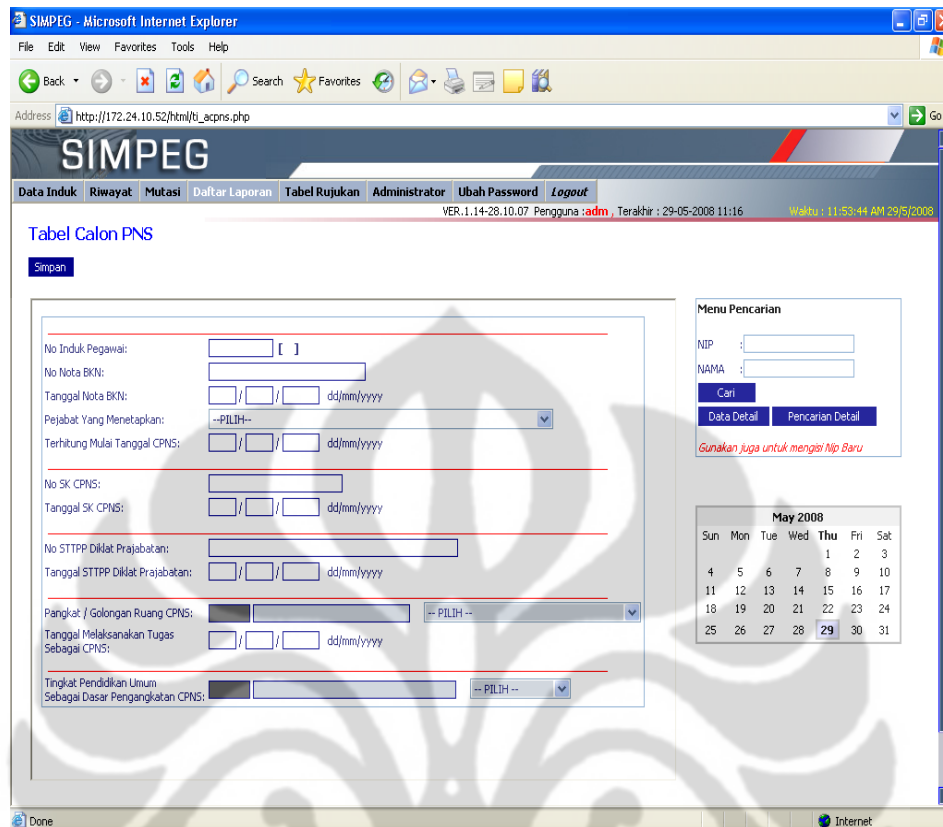


Gambar IV.5

Tampilan Data Induk

Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan pada gambar IV.5 di atas, file-file pada data induk merupakan hasil dari pengolahan data-data pokok pegawai yang di isi oleh pegawai melalui pengisian formulir yang akan menjadi database bagi instansi. Kemudian adalah contoh tampilan dalam menu data induk, lebih khusus untuk melihat tampilan tabel dari CPNS yang terdapat pada menu data induk, yaitu:

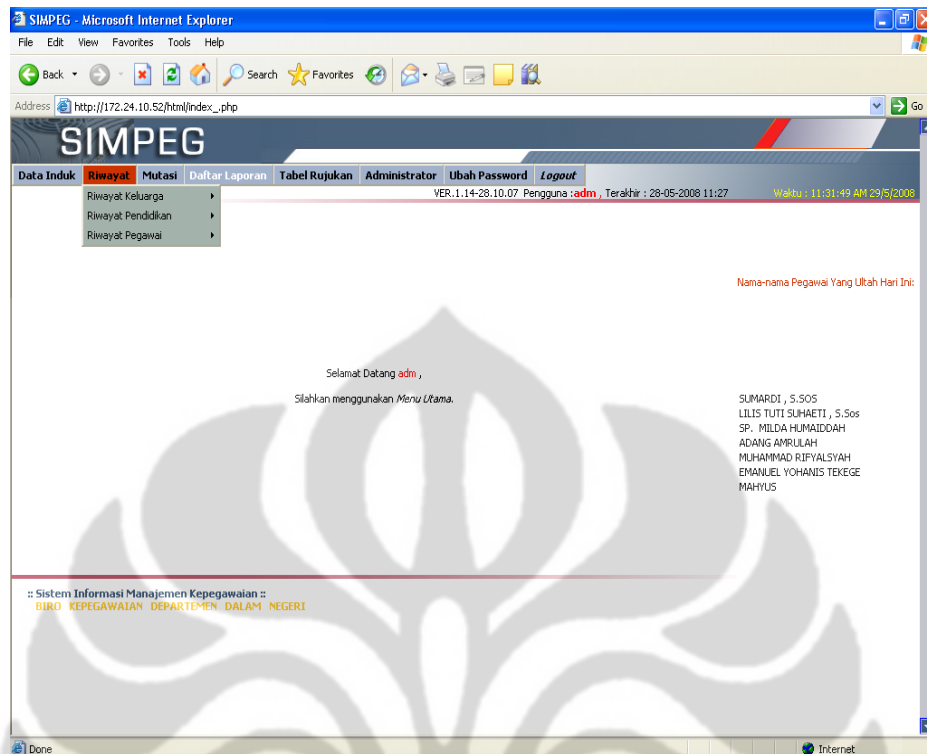


Gambar IV.6

Tampilan Tabel CPNS

Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Pada tampilan tabel CPNS dapat terlihat secara jelas mengenai biodata dari CPNS yang ada pada Departemen Dalam Negeri. Data tersebut menjadi bahan acuan pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai perubahan status menjadi PNS Departemen Dalam Negeri. Selain data induk, *input* lainnya yang terdapat pada menu utama program SIMPEG adalah data riwayat. Berikut adalah tampilan data riwayat pada program SIMPEG:



Gambar IV.7

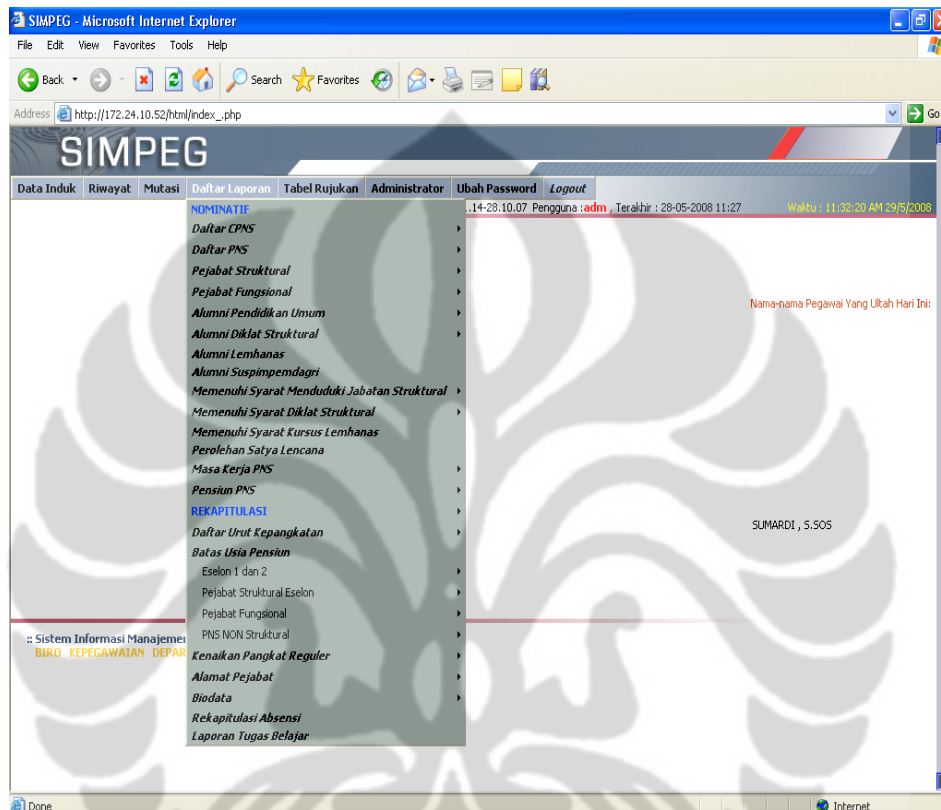
Tampilan Data Riwayat

Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan pada gambar IV.7 di atas, dapat terlihat bahwa di dalam menu data riwayat terdapat data riwayat keluarga, riwayat pendidikan, dan riwayat pegawai. *User* dapat melihat secara terperinci data riwayat pegawai sesuai dengan yang diinginkannya. Data-data tersebut merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh pegawai yang bersangkutan melalui pengisian formulir (untuk data induk berupa pengisian FIP 01 dan data riwayat berupa pengisian FIP 02).

Data yang dihasilkan oleh program SIMPEG biasanya berbentuk daftar laporan yang berisi tentang daftar pegawai-pegawai pada Departemen Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah. Data-data tersebut terdapat pada menu daftar laporan yang terdapat pada tampilan gambar di bawah ini:



Gambar IV.8

Tampilan Daftar Laporan

Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Daftar laporan merupakan hasil yang diperoleh dari pengolahan data-data pegawai melalui SIMPEG. Berdasarkan gambar IV.8 di atas, daftar laporan merupakan daftar yang memuat semua data-data yang dimiliki oleh pegawai yang bekerja di Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Daftar laporan biasanya digunakan oleh pimpinan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Data-data berbentuk laporan tersebut akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan, karena data-data tersebut memuat hal-hal yang terkait dengan pegawai di Departemen Dalam Negeri.

3. Komponen-komponen dalam Pelaksanaan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri

Dalam proses pengembangan dan pembangunan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan dikoordinasikan dengan Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi Departemen Dalam Negeri. Komponen-komponen dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri meliputi:

1. Perangkat Keras (*hardware*)
2. Perangkat Lunak (*software*)
3. *Database*
4. Sistem Jaringan Komputer (*netware*)
5. Sumber Daya Manusia (*brainware*).

Dalam pelaksanaan SIMPEG, komponen-komponen tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Komponen-komponen yang ada akan menentukan tujuan akhir dari adanya SIMPEG. Penggunaan komponen-komponen yang ada harus mengikuti perkembangan yang terjadi pada teknologi informasi. Untuk itu, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhannya.

a) **Perangkat Keras (*hardware*)**

Perangkat keras (*hardware*) merupakan perangkat yang bentuknya dapat terlihat, seperti *cpu*, monitor, *printer*, dan lain-lainnya. Menurut Sutabri, bagian-bagian pokok dalam perangkat keras meliputi, *input*, *cpu*, *secondary memory*, dan *output*.⁸⁴ Dalam konfigurasi perangkat keras pada sistem dan aplikasi SIMPEG yang ditempatkan pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri terdiri dari:

Tabel IV.1
Perangkat Keras yang digunakan dalam Pelaksanaan SIMPEG

No.	Pelaksana SIMPEG	Spesifikasi	Unit
1	Server	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium III 550 Mhz • Harddisk 8.4 GB • SDRAM 128 MB • CD Rewritable (back up) • UPS 500 KVA • Scanner Colour • FDD 1.44 MB • Display Card VGA • Monitor SEGA • LAN Card 10/100 Mbps Combo 	1
2	Client	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium III 500 Mhz • Harddisk 4.3 GB • SDRAM 128 MB • CD Rewritable (back up) • Atabilizer 500 watt • FDD 1.44 MB • Display Card VGA • Monitor SEGA • CDROM 50X 	5

⁸⁴ Tata Sutabri., *Op.Cit.*, hal 263

Berdasarkan tabel IV.1 di atas, dapat terlihat bahwa spesifikasi tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena spesifikasinya masih menggunakan teknologi lama. Spesifikasi tersebut hanya bisa dioperasikan untuk *client* sedangkan untuk *server*nya harus mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini spesifikasi yang digunakan untuk *server* sudah menggunakan spesifikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dengan menggunakan spesifikasi Quadcore dengan memori 2 GB, harddisk 146x2 GB dan konektivitasnya 10/1000 Mbps. Perangkat komputer pada Subbagian Data Pegawai selaku pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan SIMPEG mengalami penambahan jumlah *client*, yaitu bertambah sebanyak 5 *client* dan bertambah menjadi 10 *client*. Selain itu, saat ini Subbagian Data Pegawai telah menggunakan printer yang bisa saling terhubung antara jaringan satu dengan lainnya, yaitu dengan menggunakan *printer sharing*. Alasannya adalah untuk mengefisienkan waktu dan tempat.

Untuk permasalahan perawatan (*maintenance*) perangkat keras (*hardware*) dilakukan sendiri oleh pihak yang berwenang dalam pelaksanaan SIMPEG, yaitu Subbagian Data Pegawai. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

*...masalah perawatan perangkat keras, biasanya kami melakukan sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan kami meminta bantu dengan konsultan IT. Saat ini sih sebagian besar perawatan perangkat keras kami lakukan sendiri. Karena masalah perawatan ini kami sudah mengerti.*⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Pranata Komputer pada Subbagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2008

b) Perangkat Lunak (*software*)

Perangkat lunak terdiri dari file-file dan program yang dapat disimpan dan dikelola pada satu tempat dan digunakan secara bersama dari tempat yang lain. Dalam pelaksanaan SIMPEG, perangkat lunak yang digunakan telah mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terjadi. Perubahan penggunaan perangkat lunak yang terjadi telah membuat pelaksanaan SIMPEG menjadi lebih baik (tidak ketinggalan zaman). Perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri saat ini, meliputi:

- Operating System: RedHat Linux
- Database System: MySQL
- Web Server: Apache
- Programming Language: PHP
- Client Operating System: Windows XP

Penggunaan *software* dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut dapat terlihat dari informasi yang didapat dari salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu:

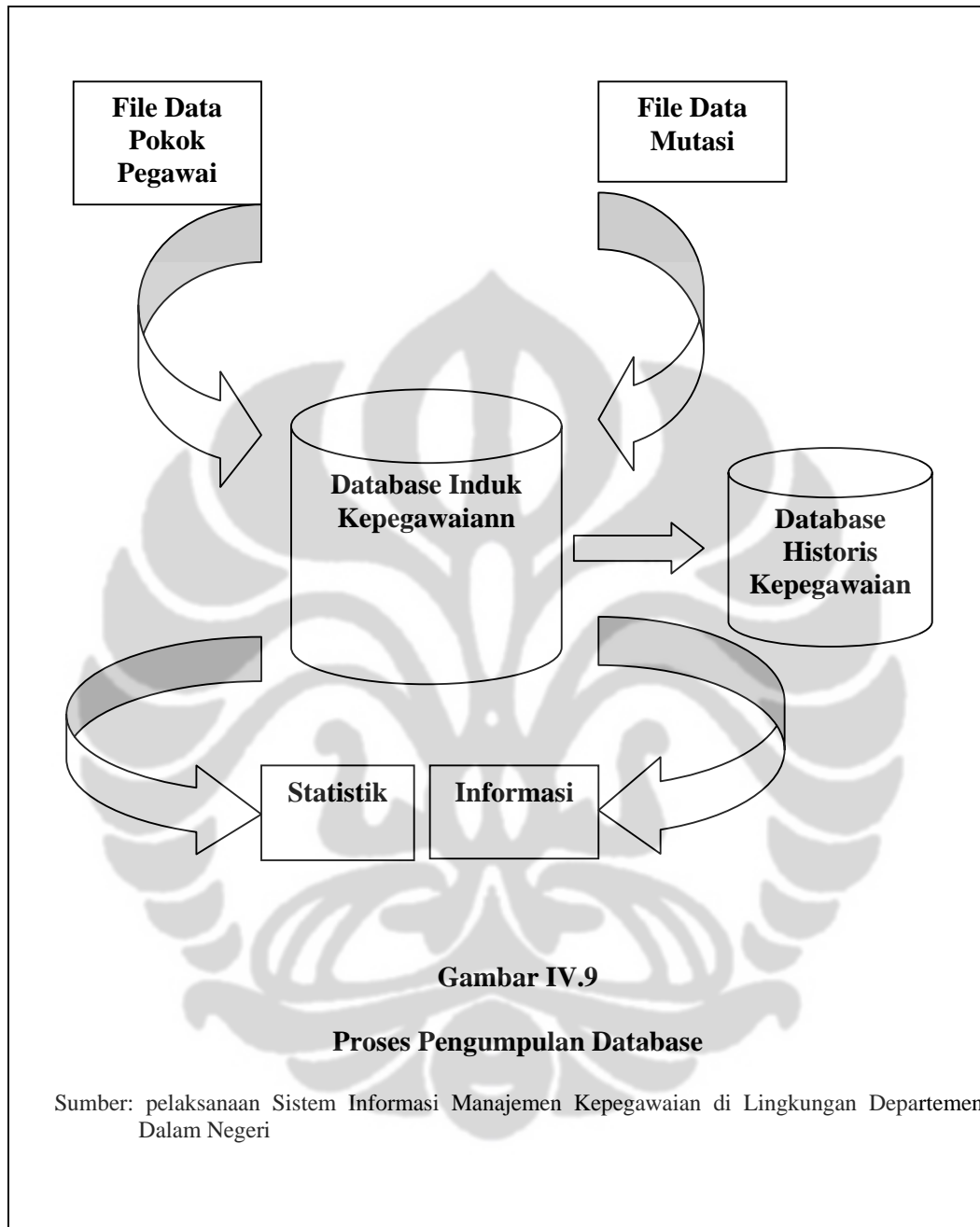
...untuk software, saya telah mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terjadi. Artinya softwarena selalu kami ubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan program SIMPEG yang ada pada kami. Selain itu, biasanya kami mengadakan kerjasama dengan konsultatan IT mengenai software yang sesuai dengan kami dan mengikuti perkembangan zaman.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

Jadi, komponen *software* yang digunakan dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri telah mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dapat terlihat dari perubahan dalam penggunaan *softwarena*.

c) ***Database***

Database yang dimaksud dalam pembangunan dan pengembangan database adalah data base kepegawaian. Pembangunan database kepegawaian sebagai bagian dari SIMPEG ini secara keseluruhan dirancang sebagai suatu interaktif sistem, dimana *user* dapat langsung berkomunikasi dengan komputer untuk mengakses data kepegawaian dan respon langsung komputer diberikan dalam bentuk suatu tampilan sebagai tanggapan terhadap *input* yang dimasukkan. Dengan sistem yang interaktif ini diharapkan *user* akan mendapatkan informasi yang terakumulasi dalam bentuk laporan dan grafik. Proses pembangunan SIMPEG dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan pada gambar di atas, dapat terlihat bahwa pembangunan database dimulai dengan file data pokok pegawai dan file mutasi. File data pegawai adalah file-file yang berisikan data pokok pegawai yang bersifat tetap

dan merupakan *input*. File mutasi adalah file-file yang berisikan data-data mutasi pegawai, bila terjadi perubahan data dan merupakan *input*. File-file tersebut ditampung menjadi database induk kepegawaian yang berisikan kumpulan data-data pegawai yang menampung seluruh elemen data dasar pegawai. Bagian dari database induk kepegawaian adalah database historis yang berisikan data-data yang terkait dengan riwayat kepegawaian. Hasil akhir dari proses tersebut adalah informasi kepegawaian yang berupa informasi dan statistik.

d) Sistem Jaringan Komputer (*netware*)

Sistem jaringan komputer (*netware*) dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri sangat berguna dalam melakukan *input* data-data pegawai yang berasal dari daerah. Data-data pegawai daerah merupakan salah satu hal penting dalam pemutakhiran data pegawai. Pemutakhiran data pegawai merupakan salah satu tujuan dari SIMPEG. Maksud dari komponen *netware*, pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri) melakukan pengumpulan data-data pegawai baik pada lingkungan departemen sendiri maupun daerah. Hal tersebut dilakukan agar data-data pegawai tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah pusat terkait masalah kepegawaian.

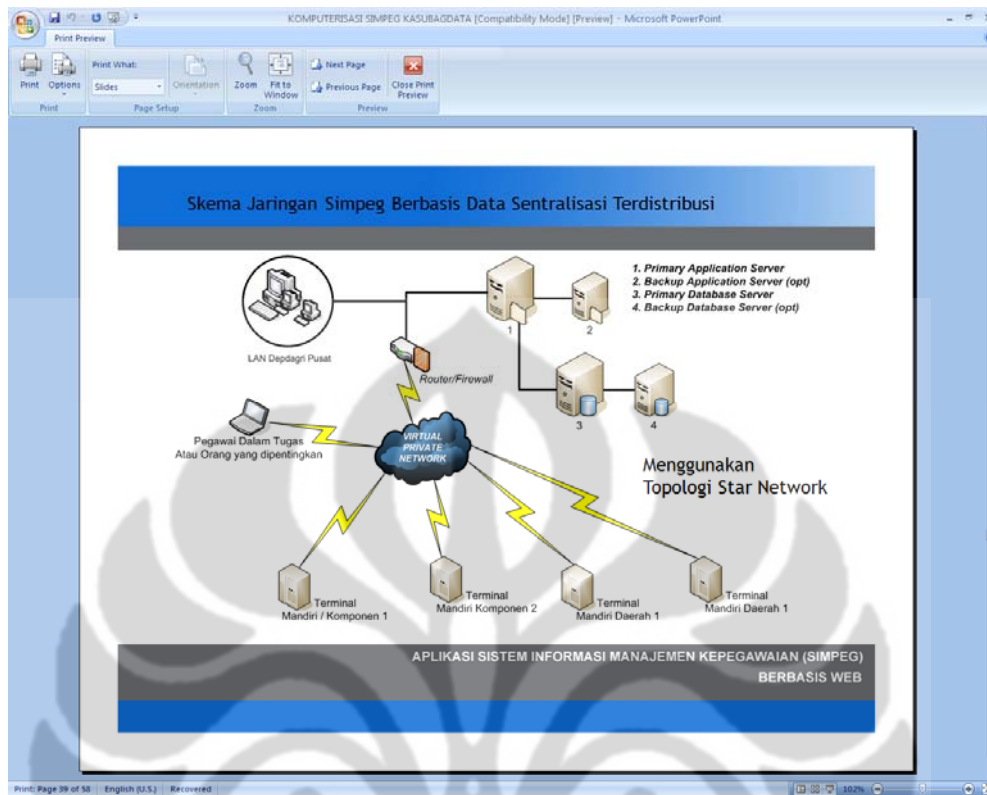
Netware digunakan sebagai sarana untuk mempermudah transaksi berupa data-data pegawai yang berada pada lingkungan departemen dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, *netware* ini sangat berguna untuk mempermudah akses data yang berasal dari daerah. Pada saat SIMPEG masih menggunakan

sistem lama, data-data pegawai daerah mengalami masalah akses ke pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu

...sistem jaringan yang digunakan pada SIMPEG lama bersifat tertutup. Maksudnya data-data pegawai hanya dapat ditransfer melalui media data berupa disket, CD, tape back-up. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi adalah terjadinya perubahan data salah seorang pegawai daerah setelah data pegawai diberikan ke depdagri. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan seorang pegawai daerah tadi dan menambah waktu dalam proses pengolahan data-data pegawai.⁸⁷

Setelah terjadinya perkembangan teknologi informasi, SIMPEG mengalami perubahan dalam penggunaan *netware*. Perubahan sistem pada SIMPEG tersebut secara tidak langsung merubah citra SIMPEG itu sendiri. Sekarang ini penggunaan SIMPEG sangat erat kaitannya dengan penggunaan sarana *on-line (internet dan intranet)*. Dengan sarana tersebut membuat akses data-data pegawai daerah menjadi lebih cepat dan tepat. Berikut dapat terlihat proses pelaksanaan SIMPEG dilihat dari komponen *netware/jaringan* dari Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Departemen Dalam Negeri, yaitu:

⁸⁷ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta



Gambar IV.10

Netware dalam Pelaksanaan SIMPEG

Sumber: pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan gambar IV.4 di atas, pada lingkungan Departemen Dalam Negeri jaringan secara *on-line (internet dan intranet)* sangat berguna dalam akses data-data pegawai antara Departemen Dalam Negeri dengan daerah. Penggunaan jaringan secara *on-line (internet dan intranet)* dapat membantu dalam akses data-data pegawai daerah yang biasanya memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, SIMPEG dengan jaringan secara *on-line (internet dan intranet)* dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan pemutakhiran data pegawai mulai dari lingkungan Departemen Dalam Negeri hingga daerah.

Data-data pegawai yang berasal dari daerah langsung diberikan kepada propinsi yang kemudian propinsi memberikannya kepada Departemen Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan secara *on-line* (*internet dan intranet*). Jaringan secara *on-line* yang digunakan oleh Departemen Dalam Negeri bersifat tertutup, tidak bisa diakses selain Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jaringan yang digunakan oleh Departemen Dalam Negeri adalah jaringan VISAT.

e) **Sumber Daya Manusia (*brainware*)**

Sumber daya manusia sangat berguna dalam suatu organisasi, baik yang bersifat organisasi publik maupun privat. Hal ini dikarena sumber daya manusia dapat menjalankan suatu sistem yang ada pada organisasi. Departemen Dalam Negeri selaku organisasi publik sangat tergantung dari kinerja dari sumber daya manusianya. Merujuk pada hal tersebut, dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, peran dari sumber daya manusianya sangatlah penting. Keempat komponen yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya dapat beroperasi bila digerakkan oleh sumber daya manusia. Dengan kata lain jika tidak mempunyai sumber daya manusia, komponen-komponen lainnya tidak akan beroperasi yang dampaknya akan mematikan jalannya suatu sistem.

Biro Kepegawaian selaku biro yang berwenang dalam pelaksanaan SIMPEG telah memiliki sumber daya manusia yang mengoperasikan SIMPEG tersebut. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang di dapat dari salah seorang informan, yang mengatakan bahwa:

...orang yang melaksanakan SIMPEG berbasis web ini dinamakan dengan nama Pranata Komputer. Mereka rata-rata berasal dari lulusan ilmu komputer, jadi mereka pastinya sudah mengerti mengenai komputer dan aplikasi-aplikasi yang telah digunakan. Pranata komputer pada subbagian ini sebanyak 8 orang dan ada 2 calon pranata komputer baru. Ada yang khusus programmer, jaringan, analisis data, statistik, dan lain-lain. Untuk menambah pengetahuannya/mengembangkan potensi yang ada mereka diikutkan kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan. Selain 8 pranata komputer, saya mempunyai staf-staf struktural. Jadi total jumlah pegawai yang saya miliki ada sekitar 17 orang dan menurut saya kualitas SDM yang ada sudah cukup lumayan.⁸⁸

Sumber daya manusia pada Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah perlu dilakukan pengembangan. Proses pengembangan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan SIMPEG dengan benar, mempunyai kemampuan untuk menggunakan program pembuatan laporan (infomaker), mengelola sistem jaringan, mengelola administrasi sistem basis data, dan memelihara basis data.

4. Analisis Pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri

Seiring dengan perkembangan zaman, memiliki dampak yang sangat penting di dalam proses pengolahan data-data pegawai. Data-data pegawai tersebut digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dalam mengambil suatu keputusan mulai dari perencanaan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai hingga pemensiunan pegawai. Hal tersebut membuat Departemen Dalam Negeri melakukan proses pembangunan dan pengembangan sistem yang

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

dapat membantu melakukan hal tersebut. Akhirnya keluarlah sistem yang bernama sistem informasi manajemen kepegawaian yang lebih dikenal dengan sebutan SIMPEG. Sasaran dari SIMPEG ini adalah terwujudnya mekanisme pendistribusian data yang diawali dari Kabupaten/Kota, Propinsi hingga Departemen Dalam Negeri melalui jaringan komunikasi data sehingga diperoleh data yang cepat, tepat, dan akurat serta berkesinambungan dengan tujuan untuk menunjang pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Sistem informasi manajemen dapat berjalan dengan baik bila komponen-komponen yang ada mampu bekerjasama. Komponen-komponen tersebut adalah perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya data (*database*), sumber daya manusia (*brainware*), dan sumber daya jaringan (*netware*). Perangkat keras dalam suatu sistem informasi manajemen berupa mesin dan media, perangkat lunak berupa program dan prosedur, *database* berupa data-data dan pengetahuan, sumber daya manusia berupa pengguna dan ahlinya, dan sumber daya jaringan berupa media komunikasi. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi sebagai suatu sistem untuk pencapaian suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai. Artinya komponen-komponen yang ada harus bekerjasama dalam *input*, pemrosesan, dan *output*. Komponen-komponen dalam pelaksanaan SIMPEG memiliki persamaan dengan komponen-komponen yang dikatakan oleh O'Brien.

Penggunaan perangkat keras dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri sudah sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara dengan salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu

Menurut saya sih, perangkat keras yang saya gunakan telah cukup baik. Dilihat dari kegunaannya dalam menunjang proses pelaksanaan SIMPEG dan untuk masalah perangkat keras saya telah berkonsultasi dengan konsultan IT saya yang lebih mengerti masalah IT. Selain itu, saya telah menggunakan teknologi yang baru, mengikuti perkembangan zaman.⁸⁹

Perangkat keras merupakan sarana yang berupa peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Masalah perawatan perangkat keras merupakan masalah yang sangat penting dalam pelaksanaan SIMPEG, karena perawatan yang baik akan membuat perangkat keras yang digunakan tidak mudah rusak. Perawatan perangkat keras dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dilakukan sendiri dan jasa konsultan. Hal tersebut dapat terlihat dari petikan wawancara di atas. Perangkat keras yang digunakan dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian antara *server* dan *client* tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga pada saat terjadi kerusakan pada perangkat keras pada komputer *server*, dapat di back-up oleh perangkat keras pada komputer *client* yang berada pada Subbagian Data Pegawai. Hal tersebut dikarenakan antara komputer pada *server* dan *client* saling terhubung satu sama lainnya. Artinya perangkat keras pada *client* dapat digunakan sebagai back-up bila terjadi kerusakan pada perangkat keras komputer *server*.

⁸⁹ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari salah seorang informan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa:

...antara perangkat keras pada komputer server dan client saling terhubung. Hal tersebut terjadi karena kedua komputer sudah memiliki data-data yang dibutuhkan oleh client dari daerah. Data-data yang ada berasal dari komputer server akan tetapi pada komputer client yang ada di dalam lingkungan Subbagian Data pegawai sudah mendapatkan sharing data.⁹⁰

Perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri terlihat sudah mengikuti perkembangan teknologi, walaupun masih “kalah” dengan penggunaan *software* yang dilakukan oleh sektor *private*. Hal ini dikarenakan, sektor sudah terlebih dahulu menggunakan teknologi dalam pelaksanaan setiap pekerjaan sedangkan sektor *public* baru memulainya. Dalam penyediaan perangkat lunak, Biro Kepegawaian mendapatkan bantuan dari konsultan IT yang sejak awal pembangunan SIMPEG sudah memberikan bantuan yang sangat penting. Untuk permasalahan pembaharuan (*upgrade*) perangkat lunak, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri telah mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan mempertimbangkan kesesuaian perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SIMPEG. Perangkat lunak digunakan untuk mempermudah program dalam pelaksanaan SIMPEG, biasanya meliputi rangkaian perintah pemrosesan data-data dan prosedur agar dapat bekerja dengan baik dalam hal pemrosesan dan penyebaran data kepada pemakainya. Dalam Pelaksanaan SIMPEG biasanya pengguna (*user*) akan diberikan *account* dan *password* yang akan berguna dalam

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

proses pengaksesan data hasil SIMPEG. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan dalam penelitian ini, yaitu

*...saya biasanya memberikan account dan password kepada user yang dapat digunakan untuk akses dalam pengambilan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya untuk memberikan acuan dalam pengambilan keputusan.*⁹¹

Hal tersebut diperkuat oleh informan lainnya, yaitu

*...tapi untuk user, baru kita berikan username dan passwordnya. Jadi, mereka bisa mengakses SIMPEG secara langsung. Tapi, ga semua data PNS yang bisa ditampilkan, semuanya tergantung pada kebutuhan user, dengan kata lain ada program search gitu. Makanya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, kita ada otorisasi data SIMPEG yang memegang namanya adalah administrator. Jadi user-usernya itu yang mau mengakses, harus mengisi account. Nantinya sama administrator akan disetujui/reject. Baru dia bisa mengakses SIMPEG*⁹²

Jaringan merupakan komponen yang dapat memberikan perubahan dalam proses pengaksesan data-data pegawai. Dengan adanya jaringan yang bersifat *on-line (internet dan intranet)*, SIMPEG dapat diakses oleh pihak luar, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah akan mengalami kemudahan pentransferan data-data pegawai daerah dengan menggunakan fasilitas *on-line (internet)*. Pemerintah Daerah tidak akan mengeluarkan biaya yang besar untuk ke pusat, tetapi hanya memerlukan fasilitas *on-line (internet dan intranet)* pada tempat kerjanya. Sedangkan untuk kalangan internal Departemen Dalam Negeri, bisa menggunakan akses *intranet*. Akan tetapi permasalahan yang muncul saat ini, layanan intranet untuk kalangan Biro Kepegawaian sendiri mengalami

⁹¹ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

⁹² Wawancara dengan Pranata Komputer pada Subbagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2008.

masalah, seperti pembangunan jaringan yang sampai saat ini masih belum terealisasi.

Untuk sumber daya manusianya yang melaksanakan SIMPEG, berdasarkan pada pengamatan dan wawancara yang dilakukan, telah sesuai dengan kebutuhan oleh Subbagian Data Pegawai. Hal tersebut sesuai dengan salah seorang informan dalam penelitian ini, yaitu

...mereka rata-rata berasal dari lulusan ilmu komputer, jadi mereka pastinya sudah mengerti mengenai komputer dan aplikasi-aplikasi yang telah digunakan. Pranata komputer pada subbagian ini sebanyak 8 orang dan ada 2 calon pranata komputer baru. Ada yang khusus programmer, jaringan, analisis data, statistik, dan lain-lain. Untuk menambah pengetahuannya/mengembangkan potensi yang ada mereka diikutkan kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan.⁹³

Berikut adalah jumlah SDM dalam pengelola SIMPEG yang wewenangnya diberikan kepada Subbagian Data Pegawai, yaitu:

Tabel IV.2

Kuantitas SDM Pengelola SIMPEG

JABATAN	JUMLAH SDM
Kepala Subbagian	1
Pranata Komputer	8
Staff	9
TOTAL	20

⁹³ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

Untuk meningkatkan kualitas SDM-nya Subbagian Data Pegawai telah bekerjasama dengan konsultan IT dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan perangkat-perangkat SIMPEG. Akan tetapi, permasalahan yang timbul, untuk proses pengembangan SIMPEG ke arah yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan zaman, SDM-nya masih belum dapat melakukannya.

Dalam hal komponen sumber daya database, SIMPEG telah memberikan dampak positif bagi *user* dalam pengambilan keputusan. Data-data yang dihasilkan dapat mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari seorang informan yang mengatakan, sbb:

Saya biasanya menggunakan informasi hasil olehan SIMPEG sebagai acuan buat saya dalam pengambilan keputusan. Setahu saya sih dulu, misalnya pengambilan keputusan peningkatan kualitas pegawai, dalam pengambilannya biasanya siapa saja yang mengajukan, akan tetapi sekarang pegawai yang menginginkan peningkatan kualitasnya harus disesuaikan. Apakah masih ada pegawai yang berada pada level bawah.⁹⁴

Data hasil SIMPEG merupakan acuan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapat dari informan dalam penelitian ini, yaitu

Sebenarnya sih yang namanya komputer, hanya bisa menyediakan informasi yang kita butuhkan saja. Jadi, data hasil SIMPEG itu belum benar-benar bisa langsung menghasilkan suatu kebijakan. Jadi, tetap saja hasil dari SIMPEG itu harus kita olah sendiri. cuma keuntungannya, kalau pakai SIMPEG data dan informasi yang kita butuhkan itu sudah tersusun rapi, jadi kita enak melihatnya, mana yang akan dipilih pegawainya. Intinya, data

⁹⁴ Wawancara dengan Kepala Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Biro Kepegawai Departemen Dalam Negeri pada tanggal 26 Juni 2008.

*hasil SIMPEG itu cuma sekedar olahan komputer, kita-kita juga yang harus mempertimbangkan keputusan yang akan diambil.*⁹⁵

Komponen-komponen yang berperan dalam pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri saling berhubungan dalam menjalankan SIMPEG secara baik dan benar. Kerjasama antar komponen-komponen tersebut dimulai dari proses *input*, pengolahan, dan *output*. Dalam proses *input* dalam SIMPEG biasanya berasal dari data-data pegawai yang berasal dari lingkungan internal Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pegawai-pegawai biasanya diberikan formulir isian pegawai (FIP) mulai dari nomor 01 sampai 01. FIP 01 berisikan data pokok pegawai diantara memuat identitas pegawai, pendidikan terakhir dan lain-lain. FIP 02 berisikan daftar riwayat pegawai diantaranya memuat riwayat kepangkatan sampai riwayat cuti. Kemudian FIP 03 berisikan daftar mutasi pegawai diantaranya memuat mutasi pengangkatan PNS sampai mutasi pensiun. Setelah itu, data-data yang telah terkumpul diolah/diproses yang akhirnya akan menghasilkan informasi pegawai di Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Informasi yang dihasilkan melalui SIMPEG dapat dilihat kualitasnya yang didasarkan pada penentuan kualitas informasi menurut O'Brien, yaitu bila dilihat dari ketepatan waktu. Informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG dilihat dari ketepatan waktu sudah sesuai. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh seorang informan dalam penelitian ini, yaitu

⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008.

.....informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG biasanya sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Misalkan saya ingin hari ini, informasinya telah ada. Jadi menurut saya informasi yang dihasilkan telah tepat waktu⁹⁶

Kemudian bila dilihat dari kebaruan informasi, Informasi yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan selalu *up to date*. Informasi yang telah lama diperbaharui/disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari informan, yaitu:

.....informasi SIMPEG selalu mengalami perbaharuan, yaitu bila ada pegawai yang naik pangkat, maka data pegawai yang bersangkutan mengalami perubahan. Begitu pula bila ada pegawai yang pensiun, maka data pegawai yang bersangkutan berubah.⁹⁷

Informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG sangat akurat, karena informasinya berasal dari pengisian pegawai secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari informan yang menyatakan bahwa:

.....yang namanya data mungkin dinamis ya. Misalnya, hari ini jumlah PNS ada sekian, kemudian bulan depan mungkin saja jumlahnya berubah, dikarenakan ada yang pensiun, mutasi, mungkin juga ada yang meninggal. Jadi, kalau bicara valid, mungkin untuk hari ini, hari dibutuhkannya informasi tersebut memang valid, tapi besok bisa saja berubah. Kalau masalah dapat dipercaya, ya iya lah. Kan data-data itu didapat dari pengisian FIP dan setiap ada perubahan kita harus lapor ke mereka dengan membawa bukti berupa fotocopy surat keterangannya yang bersangkutan. Jadi, misalnya ada data yang salah atau belum diubah, padahal kita sudah memberikan bukti perubahan itu, kita bisa komplain ke mereka.⁹⁸

⁹⁶ Wawancara dengan Kepala Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri pada tanggal 5 Mei 2008 di Jakarta

⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

⁹⁸ Wawancara dengan Kepala Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri pada tanggal 5 Mei 2008 di Jakarta

Kemudian informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG telah lengkap. Maksudnya adalah informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG telah dikatakan lengkap. Informasi yang dihasilkan berisikan secara terperinci data pegawai mulai dari pengangkatan sampai pada pemensiunan. Berdasarkan hasil wawancara oleh seorang informasi, bahwa:

.....informasi yang dihasilkan itu biasanya berbentuk dokumen yang berisikan data-data pegawai yang sangat lengkap. Hal tersebut dapat terlihat bahwa data perkawinan aja bisa ada, padahal itu data yang privasi. Bagaimana dengan data yang bersifat umum pasti ada.⁹⁹

Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui bahwa hasil dari SIMPEG berbentuk dokumen-dokumen yang berisikan data-data pegawai. Jadi bila dilihat penentuan kualitas informasi (O'Brien), informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri telah baik. Hal tersebut dapat terlihat dari penjelasan di atas.

Setelah mengetahui baik/tidaknya kualitas dari hasil SIMPEG, kemudian kita harus mengetahui bagaimana kegunaan dari informasi yang dihasilkan SIMPEG. Dalam suatu sistem informasi manajemen, peran pentingnya adalah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu organisasi.¹⁰⁰ Sesuai dengan penjelasan di atas, SIMPEG sebagai salah satu turunan dari sistem informasi manajemen memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pertimbangan/acuan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang penting dalam organisasi.

⁹⁹ Wawancara dengan Kepala Subbagian Mutasi Kader pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri pada tanggal 6 Mei 2008 di Jakarta

¹⁰⁰ Tata Sutabri, *Op-Cit.*, hal. 41

Suatu organisasi yang berkembang, biasanya membuat pengambilan keputusan disesuaikan dengan informasi-informasi yang di peroleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan mengenai pihak pengguna informasi hasil SIMPEG, yaitu:

Biasanya yang sering menggunakan itu Kepala Subbagian, kalau saya sih tinggal meng-approve hasil keputusan dari Kepala Subbagian di bagian saya. Jadi, yang banyak berperan dalam pengambilan keputusan tentang pegawai itu, ya, kepala yang paling dekat dengan pegawai itu sendiri.¹⁰¹

SIMPEG pada Biro Kepegawaian sangat berguna dalam membantu Kepala Subbagian yang ada dapat penentuan pengambilan keputusan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari seorang informan, yaitu:

.....misalnya saya kirim biodata pegawai untuk Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) di Bagian Pengembangan Karier, dari situlah Baperjakat akan menilai berdasarkan data hasil SIMPEG pegawai manakah yang akan diberikan diklat kepemimpinan misalnya. Kemudian kalau di Bagian Mutasi, jika butuh daftar nama-nama pegawai yang kira-kira akan naik pangkat pada bulan ini siapa saja, dari data hasil SIMPEG lah informasi tersebut digali. Kalau di Bagian Disiplin, biasanya mereka akan meminta nama-nama pegawai yang sudah mengabdikan 10, 20, sampai 30 tahun untuk diberikan penghargaan Satyalencana dan juga biasanya mereka selalu meminta daftar pegawai yang sudah pernah dijatuhi hukuman, dari ringan sampai berat. Semua itu kan didapat dari SIMPEG, tapi sekali lagi kita ini Cuma penyedia informasi saja. Untuk kewenangan dari informasi itu, sudah jadi milik user, antara lain Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, bahkan Kepala Biro, dan lain-lain.¹⁰²

Mengenai kegunaan dari informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG di atas, diperkuat dengan hasil wawancara dengan seorang informan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰¹ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

¹⁰² Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

Ya...kalau menurut saya sih, SIMPEG itu sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya Subbagian Formasi dan Perencanaan Pegawai butuh daftar nama-nama pegawai yang akan pensiun Bulan April dan Oktober tahun ini, maka mereka meminta informasi tersebut melalui SIMPEG, kemudian dari informasi itu kan kelihatan berapa jabatan yang lowong dan nantinya bisa digunakan untuk penentuan formasi dalam rekrutmen pegawai.¹⁰³

Pengguna (*user*) dari informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG biasanya sering digunakan oleh Bagian Pengembangan Karier. Hal tersebut dikarenakan bagian tersebut merupakan bagian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pegawai dan sering terjadi perubahan kualitas pegawai. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh seorang informan, yaitu:

.....salah satu penggunaan informasi yang dihasilkan SIMPEG adalah dalam pengembangan karier seorang PNS. Dengan melihat informasi tersebut, pimpinan akan mengetahui PNS yang perlu ditingkatkan kariernya. Penggunaan informasi hasil SIMPEG biasanya digunakan pada Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional.¹⁰⁴

Berdasarkan pada petikan wawancara di atas, Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional merupakan subbagian yang sering memanfaatkan informasi hasil SIMPEG. Pemanfaatan informasi hasil SIMPEG pada Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional, berupa pemanfaatan data-data pegawai yang telah diolah dan digunakan untuk menyiapkan usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional. Proses yang dilakukan dalam penggunaan informasi hasil SIMPEG pada Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional misalnya dalam

¹⁰³ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

hal pengangkatan PNS adalah melihat data-data pegawai yang telah diolah menjadi informasi mengenai PNS yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan pengangkatan, maka subbagian tersebut mengusulkan PNS yang akan diangkat. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

.....saya biasanya menggunakan data tersebut untuk menjalankan tugas saya sebagai "kasubag". Awalnya saya melihat datanya yang telah diolah menjadi informasi, kemudian saya lihat apakah PNS yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang telah diberlakukan/tidak. Setelah PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ada, baru saya mengusulkannya ke Baperjakat.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebaik-sebaiknya pengolahan data-data pegawai yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh *user-user*-nya. Data yang telah diolah oleh SIMPEG akan bermanfaat secara baik, jika *user-user*-nya mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari seorang informan dalam penelitian ini, yaitu

Sebenarnya sih yang namanya komputer, hanya bisa menyediakan informasi yang kita butuhkan saja. Jadi, data hasil SIMPEG itu belum benar-benar bisa langsung menghasilkan suatu kebijakan. Jadi, tetap saja hasil dari SIMPEG itu harus kita olah sendiri. Cuma keuntungannya, kalau pakai SIMPEG data dan informasi yang kita butuhkan itu sudah tersusun rapi, jadi kita enak melihatnya, mana yang akan dipilih pegawainya. Intinya, data hasil SIMPEG itu Cuma sekedar olahan komputer, kita-kita juga yang harus mempertimbangkan keputusan yang akan diambil.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri pada tanggal 5 Mei 2008 di Jakarta

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

Jadi, selengkap-lengkapnya data pegawai yang dihasilkan oleh SIMPEG, tergantung dari *user-user*-nya dalam mempertimbangkan data tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan. Selain itu, data-data pegawai yang telah diolah melalui SIMPEG, kemudian *user*-ah yang mempunyai tugas dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan bidangnya. Selain itu, SIMPEG merupakan sebuah sistem yang dikerjakan dengan menggunakan komputer, berarti data-data yang dihasilkan hanya dapat dijadikan sebagai acuan bagi *user* dalam pengambilan keputusan dan *user* tetap harus mengolahnya sendiri.

C. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri. Kendala-kendala yang ada merupakan kendala yang terkait dengan pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran

Masalah anggaran merupakan masalah yang sangat penting dalam membangun suatu sistem yang berbasis teknologi. Untuk anggaran yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri biasanya tiap akhir tahun anggaran, Kepala Subbagian Data pegawai mengusulkan sejumlah anggaran yang diperlukan. Akan tetapi anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah

yang diusulkan dan turunnya anggaran memakan waktu yang sangat lama. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

Sebenarnya kita masih mengalami permasalahan dalam hal anggaran. Jika anggaran tidak ada mau jalan gimana? Tapi, untuk masalah evaluasi, kami mengadakan evaluasi tiap tahun. Biasanya pranata komputer saya yang meminta untuk mengevaluasi SIMPEG. Tapi saat ini evaluasi yang dalam bentuk pengembangan dan inovasi belum menjadi prioritas, karena kita masih menunggu pelaksanaan SIMPEG yang ada di daerah dulu. Daerah saja masih banyak yang belum mengerti SIMPEG, masa kita udah jalan terus sedangkan daerah masih "stag". Balik lagi ke masalah anggaran, walaupun evaluasi dijalankan dan ada solusinya, kami banyak mengeluarkan inovasi yang akan diterapkan ke dalam SIMPEG. Intinya untuk evaluasi masih tersendat masalah anggaran.¹⁰⁷

Informasi di atas, diperkuat oleh informasi yang didapat dari informan lain, yaitu:

....dalam proses pembangunan dan pengembangan SIMPEG ini kami mengalami kesulitan dalam realisasi anggaran. Anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang diterima oleh kami.¹⁰⁸

Pada akhirnya kebutuhan-kebutuhan yang penting tidak dapat direalisasikan dengan optimal. Sehingga dapat mengganggu proses pelaksanaan SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri. Pendidikan dan pelatihan yang seharusnya mengikutsertakan sebagian besar pegawai-pegawai pada Subbagian Data Pegawai, hanya mengikutsertakan sebagian kecil pegawai-pegawainya. Permasalahan selanjutnya akibat anggaran adalah masalah infrastruktur jaringan *internet*. Dengan anggaran yang tidak sesuai, akibatnya untuk pembangunan dan pengembangan jaringan *internet/intranet* menjadi sedikit

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Subbagian Data Pegawai pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 31 April 2008 di Jakarta

terhambat. Misalnya saja jaringan *internet/intranet* untuk lingkungan Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri baru dipasangkan jaringan *internet/intranet* pada Subbagian Data Pegawai saja. Untuk subbagian lainnya belum terpasang, disamping karena gedung Biro Kepegawaian baru pindah ke tempat yang sekarang.

2. Pembangunan Jaringan (*intranet*) belum Terealisasi

Kendala berikutnya terkait dengan kendala pertama, yaitu masih belum terpenuhinya infrastruktur jaringan (*intranet*) pada lingkungan internal Biro Kepegawaian. *User* yang membutuhkan data-data hasil SIMPEG harus mengambil ke Subbagian Data Pegawai, hal tersebut dirasa kurang efisien. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan seorang informan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

*.....yang sudah saya sebutkan tadi, belum semua pegawai Depdagri bisa mengakses SIMPEG. Harusnya setiap komputer sudah bisa link ke server yang ada di bawah. Kan seharusnya kita hanya tinggal mengakses lewat internet/intranet saja. Hal ini mungkin karena gedung Biro Kepegawaian yang masih baru dan SIMPEG yang baru ini masih baru.*¹⁰⁹

Akses *intranet* merupakan sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan SIMPEG, karena dengan hal tersebut, *user-user* yang berada pada lingkungan internal Departemen Dalam Negeri dapat dengan mudah untuk melihat data-data pegawai, dengan kordinasi dari Kepala Subbagian Data Pegawai. Saat ini akses SIMPEG hanya bisa dilakukan di dalam Subbagian Data Pegawai dan Pemerintah

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kepala Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri pada tanggal 5 Mei 2008 di Jakarta

Daerah. Permasalahan yang terjadi dikarenakan terjadinya ketidakjelasan informasi mengenai *account* dan *password* yang diberikan untuk *user*. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

Kalau SIMPEG yang dulu yang masih berbasis desktop saya punya account, tapi saya jarang membukanya. Kalau SIMPEG yang sekarang, yang berbasis web, saya belum bisa akses sendiri. Dengan kata lain, saya belum punya account. Mungkin karena SIMPEG web ini masih baru ya, sekitar setahun yang lalu, jadi belum semuanya bisa pakai.¹¹⁰

Jadi, permasalahan yang diakibatkan *akses* sangat merugikan para *user* yang berada di *internal* Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri. Seharusnya *user* yang berada di *internal* Biro Kepegawaian mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data-data pegawai yang akan digunakan sebagai acuan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari informan, mengatakan bahwa:

.....untuk jabatan fungsional, jika kita butuh informasi tentang jabatan fungsional, misalnya siapa saja pegawai jafung yang akan pensiun bulan ini, SIMPEG masih belum bisa mengklasifikasikannya sendiri. Karenakan masa pensiun untuk tiap jafung berbeda-beda. Kecuali, kalau kita search perjabatan. Misalnya jafung pranata komputer saja atau jafung dosen saja. Tapi, untuk keseluruhan jafung, SIMPEG belum bisa. Yang ketiga, untuk jafung lagi nih, khusus untuk eselon IV ke bawah, belum bisa ditampilkan seluruhnya. Misalnya saya ingin tahu siapa saja anak buah saya atau yang ada di bawah saya dalam jafung, nah SIMPEG ini belum bisa menampilkannya.¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan Kepala Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri pada tanggal 5 Mei 2008 di Jakarta

¹¹¹ Wawancara dengan Kepala Subbagian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri pada tanggal 5 Mei 2008 di Jakarta

3 Kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses Pengembangan SIMPEG

Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam suatu organisasi yang menentukan kemajuan suatu organisasi. Pelaksanaan SIMPEG depdagri sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya. Untuk kualitas dalam hal pelaksanaan SIMPEG berbasis *web*, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

...kualitas SDMnya dilihat dari jenjang pendidikan, mereka rata-rata berasal dari lulusan ilmu komputer, jadi mereka pastinya sudah mengerti mengenai komputer dan aplikasi-aplikasi yang telah digunakan. Pranata komputer pada subbagian ini sebanyak 8 orang dan ada 2 calon pranata komputer baru. Ada yang khusus programmer, jaringan, analisis data, statistik, dan lain-lain. Untuk menambah pengetahuannya/mengembangkan potensi yang ada mereka diikutkan kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan.¹¹²

Permasalahan terjadi disaat dibutuhkannya proses pengembangan SIMPEG kearah yang lebih baik. Seperti telah diketahui bahwa SIMPEG merupakan suatu sistem yang selalu berkembang mengikuti arah perkembangan teknologi informasi. Sedangkan sumber daya manusia pengelola SIMPEG pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri untuk proses pengembangan suatu sistem mengalami kesulitan. Misalnya perubahan dari SIMPEG berbasis *desktop* ke berbasis *web*, mereka masih belum bisa mengerjakan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan seorang informan dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹² Wawancara dengan Pranata Komputer pada Subbagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2008.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Departemen Dalam Negeri dan Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri. Biro Kepegawaian merupakan salah satu Biro yang berada pada Sekretariat Jenderal yang berwenang dalam pelaksanaan SIMPEG.

A. Sejarah Departemen Dalam Negeri

Sejarah Departemen Dalam Negeri awalnya berdiri pada zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942. Pada zaman Hindia Belanda tersebut Departemen Dalam Negeri bernama *Departement van Binnenlands Bestuur* yang mempunyai bidang tugas meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Kemudian dilanjutkan kembali pada zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departemen Dalam Negeri yang bernama *Departement van Binnenland Bestuur* oleh pemerintah Jepang diubah menjadi *Naimubu* yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Naimubu atau Kementrian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Naimubu dipecah menjadi:

- Kementrian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementrian Dalam Negeri.

.....untuk membuat program secara keseluruhan dan pengembangan sistem itu sendiri, saya rasa belum dan masih harus menggunakan jasa konsultan. Setelah itu, untuk alih teknologi dari konsultan ke kita, maka diikutilah diklat-diklat/ belajar langsung dari konsultan IT. Ntah kita yang kesana atau mereka yang dipanggil kesini. Untuk belajar dari konsultan sudah satu kali dilakukan. Namun, hanya beberapa bulan dan itu baru pada tingkat dasar. Karena kalau kita itu yang mahir masih dalam SIMPEG yang lama (closed system), kalau itu kita udag bisa buat apa saja, istilahnya udah hafal. Namun, kalau SIMPEG yang baru ini, kita harus up-grade. Karena web untuk pemerintahan itu baru, begitu juga dengan kita. Beda dengan swasta, kalau mereka udah canggih-canggih.¹¹³

Jadi, dalam hal pengembangan SIMPEG yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, sumber daya manusianya masih mengalami kesulitan dalam melakukan inovasi. Sumber daya manusia pengelola SIMPEG masih bergantung dengan konsultan IT. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia pengelola SIMPEG melakukan pelatihan mengenai SIMPEG.

¹¹³ Wawancara dengan Pranata Komputer pada Subbagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2008.